

Vol. XVII No. 4 Des. 2007

JURNAL HUKUM

SK Akreditasi Dirjen Dikti No. 26/DIKTI/KEP/2005

ISSN 1412-2723

JURNAL HUKUM	VOL XVII	NO 4	HALAMAN 511 - 687	FH UNISSULA	ISSN 1412-2723	AKREDITASI No 26/DIKTI/KEP/2005
-----------------	-------------	---------	----------------------	----------------	-------------------	------------------------------------

JURNAL HUKUM

Vol. XVII, No. 4, Des. 2007

ISSN 1412-2723

JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEBAGAI MEDIA PUBLIKASI PENELITIAN DAN ANALISIS HUKUM

Terbit Tiga Bulan Sekali

Penerbit :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Koordinator/Penyunting Penyelia :

Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H., (C.D.)

Mitra Bestari/Penyunting Penelaah :

Prof. Dr. Muladi, S.H.; Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.; Prof. Dr. Sri Sumarwani, S.H., M.H.;
Prof. Dr. Esmi Warrasih P., S.H. M.S.; Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih., S.H.;
Prof. Abdullah Kelib, S.H.; Prof. Dr. Yusriyadi, S.H. M.S.;
Prof. Dr. M. Ali Mansyur, S.H., Sp.N., M.Hum.; Dr. Djauhari, S.H., M.Hum.

Penyunting Pelaksana :

Umar Ma'ruf, S.H. Sp.N, M.Hum. (C.D.); Mahfudz Ali, S.H., M.Si. (C.D.);
Dr. Mustaghfirin, S.H., M.Hum.; Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.;
Faisol Azhari, S.H., M.Hum.; Widayati, S.H., M.H.; Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M. Hum;
Arpangi, S.H., M.H.; Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H.

Tata Usaha :

Gunarso Untung Sartono, S.H.

Alamat Redaksi / Tata Usaha :

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50012, PO BOX. 1054 / SM

Telepon (024) 6583584, Pes. : 521. Fax. (024) 6582455

E-mail : informasi@unissula.ac.id

Harga per eksemplar : Rp. 20.000 (belum termasuk ongkos kirim)

Jurnal Hukum Terbit Perdana Maret 1992 dengan nama
MAJALAH HUKUM KALIGawe Nomor ISSN 0854-3941 mulai
Maret 1999 berubah nama menjadi JURNAL HUKUM
diterbitkan setiap tiga bulan sekali oleh FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG

PENGANTAR REDAKSI

Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas telah terbitnya *Jurnal Hukum* Volume XVII No. 4, Desember 2007 ini. Pada edisi nomor ini tersajikan di tangan pembaca yang budiman beragam tulisan ilmiah yang sebagian besar berfokus pada hubungan hukum dengan isu globalisasi. Sehingga kajian ilmiah ini bisa dipakai sebagai acuan diskusi di antara kita.

Pada tulisan pembuka, pembaca diajak oleh *Hibnu Nugroho* seorang staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman untuk mengkaji **Optimalisasi Penegak Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Global di Indonesia**. Dalam tulisan ini Hibnu menyatakan, munculnya kejahatan-kejahatan transnasional harus pula dihadapi dengan keikutsertaan negara dalam perjanjian-perjanjian antara negara yang bertujuan memerangi suatu jenis kejahatan. Hal tersebut akan memberikan kemanfaatan yang optimal bagi negara yang ikut bergabung. Sedangkan di sisi lain peran penegak hukum untuk mampu melakukan penafsiran hukum yang progresif juga masih tetap harus dilakukan.

Tulisan Lain yang bertopik Globalisasi juga bisa dilihat dari karya: *Hidayatulloh; Ni Ketut Supasti Dharmawan; Sri Lestariningsih; Nur Sulisty B. Ambarini; Muhammad Akib; Theresia Anita Christiani dan Sukresno*. Di samping itu ada tulisan lain yang tidak berkaitan dengan globalisasi tetapi tetap membahas persoalan hukum, yaitu tulisan *Winarno dan Sri Endah Wahyuningsih*.

Penyudah kata, redaksi sungguh sangat berterima kasih kepada para penulis yang telah mengirimkan tulisannya dan memohon maaf kepada mereka yang tulisannya belum termuat dalam edisi kali ini. Tegur sapa dan kritik selalu redaksi harapkan kehadirannya untuk perbaikan di edisi mendatang.

Semoga bermanfaat dan selamat membaca.

Redaksi

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	ii
Optimalisasi Penegak Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Global di Indonesia <i>Oleh: Hibnu Nugroho</i>	511-522
Industri Jamu Menghadapi Pasar bebas ASEAN (Kesiapan Dan Kendala–Kendala Yang Dihadapi Industri Jamu Di Jawa Tengah) <i>Oleh: Hidayatulloh</i>	523-544
Mengelola Globalisasi Melalui Model Strategi (Proteksi Hukum Terhadap Intangible Asset Indonesia) <i>Oleh: Ni Ketut Supasti Dharmawan</i>	545-562
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dari Berbagai Bentuk kejahatan Korporasi oleh Multi Nation Corporation (MNC) <i>Oleh: Sri Lestariningsih</i>	563-581
Pemberdayaan Koperasi Sebagai Lembaga Keuangan Mikro di Era Globalisasi <i>Oleh: Nur Sulistyo B. Ambarini</i>	582-594
Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan di Era Globalisasi Ekonomi <i>Oleh: Muhammad Akib</i>	595-613
Peran Negara Sebagai Konsekuensi Keikutsertaan Indonesia di Dalam GATT Dalam Kaitannya Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang <i>Oleh : Theresia Anita Christiani</i>	614-628
Tanggung Jawab Negara Terhadap Masyarakat Miskin di Era Globalisasi Ekonomi <i>Oleh: H.S. Tisnanta</i>	629-646
Pendayagunaan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Dalam Era Dinamika Global <i>Oleh: Sukresno</i>	647-664
Perspektif Yuridis tentang Hubungan Hukum Antara Nasabah dan Bank <i>Oleh : Winarno</i>	665-676
Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam dan Perkembangannya dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. <i>Oleh: Sri Endah Wahyuningsih</i>	677-686
Senarai Penulis	687

PERAN NEGARA SEBAGAI KONSEKUENSI KEIKUTSERTAAN INDONESIA DI DALAM GATT DALAM KAITANNYA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Theresia Anita Christiani

Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Abstrak

Keikutsertaan Indonesia dalam WTO membawa konsekwensi berbagai aspek, terutama bagi pelaku usaha dan pemerintah. Salah satu aspek yang mendukung berhasilnya sistem perdagangan bebas adalah pencegahan dan pemberantasan hasil tindak pidana pencucian uang. Dalam upaya tersebut peran negara menjadi relevan untuk dibicarakan ketika globalisasi membawa konsekwensi adanya universalisasi peraturan yang menjadi kewajiban bagi negara-negara anggota termasuk Indonesia untuk tetap berpegang pada tujuan hukum demi kemanfaatan dan kebahagiaan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Peran Negara; GATT; Pencucian Uang.

I. Pendahuluan

Pada abad 20 upaya untuk lebih menngkonkritkan adanya perdagangan bebas dibuktikan dengan terbentuknya General agreement on Tariffs and trade (GATT) dan organisasi yang mewadahi disebut dengan Organisasi Perdagangan Dunia atau (World Trade Organization). Hal ini berarti bahwa WTO adalah lembaga atau organisasi yang mewadahi negara-negara yang ikut dalam era perdagangan bebas itu sendiri sedangkan GATT adalah menunjuk pada bentuk perjanjian yang dibuat oleh Negara-negara tersebut. WTO merupakan organisasi yang didirikan setelah beberapa kali adanya perundingan tentang Gatt yang dimulai sejak tahun 1947 di Geneva yang dikenal dengan Geneva Round . WTO resmi didirikan pada tanggal 1 Januari 1995 berdasarkan rekomendasi dari Putaran Uruguay, yang diresmikan dengan perjanjian Marakesh. Beberapa kelebihan dari WTO ini (Munir Fuady, Hukum Dagang Internasional(Aspek Hukum WTO),2004,26-27) anatara lain yaitu WTO mempunyai badan penyelesaian sengketa (Dispute Settlement Body) yang akan mengadili para anggotanya dan memberikan sanksi bagi Negara anggotayang tidak mengindahkan putusan , kelebihan lain yaitu pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat dengan segala kelebihan dan kekurangan. Bila dikaji bahwa kelebihan ini seperti adanya sansi merupakan hal yang akan mendorong pelaksanaan dari consensus tersebut akan dapat dijamin pelekasaannya sehingga tujuan pembentukkannya dapat secara konsisten dilaksanakan oleh para anggotanya .

Perdagangan bebas dalam arti yang sebenarnya adalah arus barang dan jasa yang bebas melewati batas negara. Perdagangan ini tidak dihambat oleh campur tangan pemerintah, baik berupa tariff maupun hambatan-hambatan lainnya. Konsep ini didasari oleh teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa perdagangan dapat dilakukan dengan baik apabila sumber-sumber dapat mengalokasikan dengan efisien, dan untuk kesejahteraan paling tinggi, dan semua produsen dibiarkan menghasilkan apa yang mereka buat paling baik, mereka lalu dapat menjual produk mereka dalam iklim persaingan bebas dan terbuka. (Syahmin, Raja Grafindo, 2007, hal, 22). Bila dikaji maka persaingan bebas sebenarnya tidak mungkin akan tercapai karena masing-masing Negara yang tergabung dalam organisasi perdagangan bebas mempunyai posisi dan kemampuan yang berbeda, sehingga dalam prakteknya bila ada suatu Negara yang mempunyai kekuatan yang lebih besar berinvestasi pada suatu Negara yang lebih rendah kekuatannya, maka tentu saja Negara penerima akan mempunyai bargain power yang tidak baik, apalagi peran pemerintah yang biasanya sangat mendukung investor asing daripada investor di negaranya sendiri. Terdapat pro dan kontra terhadap globalisasi yang sekarang terjadi, tetapi perdebatan tersebut menjadi tidak relevant ketika Indonesia kemudian menandatangani dan menegesahkan Agreement Establishing The World Trade Organization dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1994. Konsekuensi logis dari pengesahan tersebut adalah kesiapan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam GATT tersebut yang kemudian diimplementasikan dalam peraturan-peraturan yang mendukung terlaksananya perdagangan bebas tersebut.

WTO mempunyai prinsip untuk merupakan suatu sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil. Dalam menjalankan prinsipnya tersebut maka terdapat 4 prinsip dasar dalam WTO tersebut.

1. Most Favoured nations

Prinsip Most Favoured Nations ini berprinsip bahwa suatu perdagangan mestilah dijalankan berdasarkan suatu asas non diskriminasi, yakni tidak boleh membedakan antara satu anggota yang satu dengan satu anggota yang lain. (Munir Fuady, 2004, 69) Hal ini berarti bahwa suatu Negara anggota dari WTO ini tidak diperbolehkan untuk memberikan perlakuan yang berbeda dalam bentuk tariff misalnya antara Negara yang satu dengan Negara yang lain. Tariff dalam hal ini adalah suatu pajak yang ditarik oleh pemerintah atas barang-barang impor yang menyebabkan menjadi semakin tingginya harga barang tersebut di pasar domestic.

2. Tariff Binding

Dalam menjamin perdagangan Internasional yang lebih dapat diperkirakan sebelumnya maka diputuskan untuk melakukan tariff binding atau suatu komitmen yang mengikat suatu Negara-negara anggota supaya tidak meningkatkan bea masuk terhadap barang impor setelah masuk dalam daftar komitmen binding.

3. National Treatment.

Prinsip ini dimaksudkan bahwa negara anggota WTO tidak memberikan perlakuan yang berbeda antara terhadap investor dalam negeri dan investor luar negeri khususnya yang sama-sama menjadi anggota WTO. Hal ini ditetapkan karena biasanya suatu negara mengenakan pajak pada barang impor yang melebihi pajak terhadap barang domestik yang sejenis. Hal ini bila dilakukan akan membuat barang luar negeri akan lebih mahal dibandingkan dengan barang dalam negeri sehingga ini akan mengakibatkan ketidakseimbangan perlakuan yang dirasakan tidak adil bagi pelaku bisnis luar negeri.

4. Non – Tariff Barrier

Prinsip Non Tariff barriers ini sering disebut prinsip Non tariff measurements adalah tindakan dari negara-negara tertentu anggota World Trade Organization yang mempunyai tujuan melindungi industri dalam negerinya dengan cara yang tidak bersifat Tariff Measures. Hal ini tidak dapat dibenarkan, artinya untuk memproteksi industri dalam negeri maka perlindungan nya dalam bentuk suatu tariff sehingga dapat diukur dan dapat lebih menjamin kompetisi antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Bagi negara anggota WTO khususnya Indonesia prinsip-prinsip tersebut harus selalu menjai dan secara konsisten dilaksanakan, bila tidak maka terdapat sanksi yang akan diputuskan oleh badan penyelesaian sengketa di WTO tersebut. Ratifikasi tsb tentu membawa dampak bagi berbagai aspek, terutama bagi pelaku usaha dan pemerintah. Salah satu aspek yang mendukung berhasilnya sistem perdagangan bebas adalah pencegahan dan pemberantasan hasil tindak pidana pencucian uang.

Peran negara menjadi relevan untuk dibicarakan ketika globalisasi membawa konsekuensi adanya universalisasi peraturan yang menjadi kewajiban bagi negara-negara anggota termasuk Indonesia untuk tetap berpegang pada tujuan hukum demi kemanfaatan dan kebahagiaan masyarakat Indonesia.

II. Permasalahan :

1. Apakah peran negara masih relevan dalam perdagangan bebas khususnya dalam mencegah dan memberantas tindak Pidana Pencucian Uang ?
2. Apakah UU tersebut sudah memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat di Indonesia dengan adanya perdagangan bebas tersebut?

III. Pembahasan

A. Tinjauan Tentang Peran Negara dalam Era Globalisasi

Globalisasi berakar dari teori neo klasik yang berpandangan bahwa perekonomian dibiarkan berjalan sesuai mekanisme pasar, pendapat ini selanjutnya merangsang bahwa campur tangan pemerintah akan

mengganggu berjalannya mekanisme pasar, pasar menjadi tidak efisien. Dalam pandangan paham ini maka peran negara sedapat mungkin dikurangi atau sama sekali dihilangkan. Paham ini memang menjadi dasar adanya perdagangan bebas yang ada pada saat ini. Pandangan paham ini memang tampak dalam era globalisasi ini dimana peran negara lebih banyak digantikan oleh kesepakatan-kesepakatan dalam GATT tersebut. Pandangan Yang berpijak pada teori Adam Smith ini mengatakan bahwa menurut kebebasan Alami pihak penguasa hanya mempunyai 3 kewajiban, yakni pertama melindungi masyarakat dari tindak kekerasan, dan invansi dari negara lain, kedua, semaksimal mungkin melindungi individu dari ketidakadilan, atau penindasan, oleh masyarakat lainnya, atau menegakkan sistem peradilan yang tepat, ketiga menegakkan serta mempertahankan karya dan lembaga masyarakat tertentu yang tidak akan pernah dilakukan individu atau sekelompok kecil individu. (David Korten, 1997). Dari 3 kewajiban tersebut memang negara tidak diberi peran dalam mengatur mekanisme pasar, tetapi dari kewajiban yang pertama dapat dikaji bahwa bila mekanisme pasar mengakibatkan ketidakadilan bagi warganegara tentulah tugas penguasa untuk melindungi ketidakadilan tersebut. Peran negara yang terbataspun juga dikemukakan oleh I. Wibowo yang mengatakan bahwa kaum hiperglobalis yang mengatakan bahwa peran negara tidak diperlukan lagi dalam pembangunan ekonomi, atau kalau toh diperlukan hanya dalam konteks penjaga keamanan (defense), penyediaan infrastruktur, dan menjamin penegakan hukum (I. Wibowo, 281)

Peran negara yang cukup besar dapat dilihat pada era sebelum tahun 1970, pada saat itu peran negara sangatlah besar dengan dilatarbelakangi oleh yang pertama adanya kegagalan pasar, kedua memobilisasi sumber dan dalam rangka alokasi sumber-sumber tersebut dan yang ketiga argumentasi attitude/sikap atau psikologis (Budi Winarno, 141). Hal ini memang sesuai dengan paham Keynesien yang mempunyai paham bahwa intervensi pemerintah sangatlah penting dalam membangun perekonomian. Relevansi peran negara dalam masyarakat global antara lain didukung oleh beberapa alasan: pertama sebagian besar negara bangsa, masih hidup dibawah kemiskinan kedua tidak mungkin untuk menyerahkan pembangunan ekonomi semata-mata kepada pasar karena kinerja individu-individu yang dibiarkan mengejar keuntungan ekonomi mereka masing-masing tidak akan menjamin adanya keadilan dalam distribusi pendapatan di masyarakat.

Dari uraian tersebut dapat dikaji bahwa dalam era globalisasi yang berpijak dari paham Adam Smith yang meminimalkan peran negara dalam sistem perekonomian yang ada, tidak pasti berakibat baik bagi keberhasilan perekonomian negara tersebut. Seperti di Indonesia Campur tangan negara tetap menjadi sesuatu yang penting seperti yang diungkapkan oleh Keynes, tetapi dalam bidang-bidang

yang selektif. Campur tangan tersebut dikongkritkan dalam bentuk peraturan perundangan yang dibuat oleh penguasa, hal tersebut sama dengan pandangan paham positivisme yang mengutamakan kepastian hukum dalam mengejar tujuannya. Sebenarnya bila dikaji bahwa peran negarapun dalam ajaran Adam Smith masihlah relevent dalam hal adanya ketidakadilan dan kegagalan mekanisme pasar yang diakibatkan oleh adanya perdagangan bebas. Artinya bahwa menjadi kewajiban penguasa untuk meminimalisasi ketidakadilan bagi warganegara Indonesia sebagai dampak globalisasi tersebut. Dapat diartikan bahwa tidak ada pertentangan antara paham Adam Smith dan Keynessian ini berkaitan dengan peran negara tersebut.

B. Tinjauan tentang UU Tindak Pidana Pencucian uang

Pembahasan mengenai Tindak Pidana Pencucian uang sudah pernah dilakukan oleh Yenty Ganarsih dalam disertasi yang berjudul Kriminialisasi Pencucian Uang (Money Laundering), disertasi tersebut membahas mengenai Tindak pidana Uang dari substansi norma-norma dan bagaimana pelaksanaannya. Perbedaan dengan pembahasan yang akan dilakukan ini adalah bahwa tulisan ini mencoba melihat peranan negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai dampak adanya globalisasi, tulisan ini mencoba melihat permasalahan tersebut tidak hanya dari aspek hukum atau norma-normanya saja tetapi juga mengkaitkan dengan teori ekonomi yang relevant dengan masalah globalisasi dan bagaimana peran negara diperlukan dalam globalisasi tersebut.

Tindak pidana Pencucian Uang mempunyai dampak buruk baik dari tataran nasional, maupun internasional. Secara internasional upaya melawan kegiatan tindak pidana Pencucian uang ini dilakukan dengan membentuk suatu tugas yang disebut The Financial Action Task Force (FATF) on Money laundering oleh kelompok G7 (Adrian Sutedi, 2007, hal 79) dalam G7 Summit di Prancis pada bulan Juli 1989. FATF ini beranggotakan 29 negara/teritorial serta 2 organisasi regional. Untuk Wilayah Asia pasific terdapat The Asia Pasific Group on Money laundering (APG), Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 2000. FATF mempunyai peran untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. FATF telah mengeluarkan 40 pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta 8 rekomendasi khusus untuk pemberantasan pendanaan bagi kegiatan terdapatnya. Rekomendasi ini telah menjadi pedoman dalam pemberantasan ataupun mencegah tindak pidana pencucian uang. Dari uraian diatas maka upaya yang dapat ditempuh adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana pencucian uang di berlakukannya karena adanya tekanan dari internasional (FATF) juga karena adanya kebutuhan domestik yang mendesak untuk ditangani. Oleh karena itu dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka disahkan UU No 15 tahun 2002

sebagaimana telah dirubah dengan UU No 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam Penjelasan UU No 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang maka dapat dikatakan bahwa Perubahan UU ini dari UU no 15 Tahun 2002 ke UU No 25 tahun 2003 didasari bahwa perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas antara negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang singkat keadaan ini disamping mempunyai dampak positif juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana (money laundering). Hal ini berarti bahwa tindak pidana pencucian uang ini berkaitan dengan transaksi antara negara satu dengan negara lain sehingga pencucian uang tersebut berkaitan dengan masalah global antara negara yang satu dengan negara yang lain. Hal ini dapat diartikan bahwa problematik tentang pencucian uang ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melampaui batas-batas negara.

Undang-undang pencucian uang mempunyai tujuan bahwa pihak-pihak yang melakukan tindak pidana pencucian uang ini bisa dihukum sesuai pidana pokok yang dia lakukan dan uang hasil kejahatan tersebut dapat diambil oleh negara.

Berkaitan dengan hal itu dikenal aliran didalam filsafat hukum yaitu aliran positifisme yang memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya antara *das sein* dan *das sollen*) dalam kaca mata positivis tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (Law is the command of the Lawgivers) bahkan, bagian dari aliran hukum positif yang dikenal dengan nama legalisme menyatakan dengan tegas bahwa hukum identik dengan undang-undang (Darji Darmodiharjo, Sidharta, 114). Pendapat positivisme ini kemudian ditentang oleh mazhab sejarah antara lain Von Savigny yang mengatakan bahwa hukum tidak dibuat tetapi tumbuh berkembang dalam masyarakat. Paham yang menentang positivisme adalah paham *Freirechtslehre* yang berpendapat bahwa hakim harus mempunyai tugas menciptakan hukum. Tujuan hukum dalam hal ini adalah tidak hanya keadilan, tetapi kepastian dan kemanfaatan tetapi menurut penganut teori positivisme yaitu Hans Kelsen yang menganggap bahwa hukum berurusan dengan (forma), bukan isi (materia). Jadi keadilan sebagai isi hukum berada diluar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa, berkaitan dengan tujuan hukum pandangan positivisme walaupun keadilan merupakan tujuan hukum,

hanya saja mereka menyadari sepenuhnya bahwa relativitas dari keadilan seringkali mengaburkan unsur lain yang lebih penting yaitu kepastian hukum. Berarti dalam hal ini kaum positivistik lebih mengutamakan kepastian hukum. Berarti dalam hal ini Kelsen tidak menganggap keadilan merupakan tujuan hukum yang utama. Hal ini berbeda dari paham utilitarianisme yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.

Bila dikaji maka UU Tindak Pidana pencucian uang yang ada di Indonesia sebagai konsekuensi dari globalisasi yang telah disepakati merupakan hukum yang dibuat oleh penguasa, tiada hukum yang lain kecuali perintah penguasa yang diwujudkan dalam bentuk UU hal ini sesuai dengan pandangan positivisme hukum. Selanjutnya dapat dikaji lebih lanjut bahwa positivisme memandang kepastian hukum merupakan hal yang paling utama daripada keadilan. bila kita kaitkandengan definisi eadilan menurut purnadi Purbacaraka dan soerjono soekanto (1985,7-9) teori-teori keadilan sangatlah relatif, sehingga keadilan tidak lain adalah keseimbangan dari nilai-nilai antinomi yang ada. Jika dikaitkan apakah Undang-Undang tindak pidana Pencucian Uang sudah memberikan keadilan bagi bangsa Indonesia maka yang dimaksudkan adil adalah adanya keseimbangan kepentingan internasional dan kepentingan nasional sendiri, dalam arti bahwa dengan disyiahkannya keikutsertaan Indonesia dalam GATT maka kepentingan nasional tidak boleh diabaikan. Dengan dilaksanakannya UU Tindak pidana Pencucian uang tersebut maka terdapat korelasi positif dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan di Indonesia yang nanti pada akhirnya kan dapat meningkatkan kemakmuran dan tujuan hukum untuk kebahagiaan manusia seperti yang dikatakan oleh Jeremy Betham akan dapat terwujud. Pandangan positivisme yang mengutamakan kepastian hukum dalam Pelaksanaan Undang-Undang tindak pidana Pencucian uang menjadi relevan untuk diungkapkan. Tetapi Pandangan Utilitarisme yang beranggapan bahwa hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan bagi masyarakat dapat menjadi hal yang relevan juga untuk dibicarakan.

C. Pengertian Pencucian uang

Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundry yang ketika itu terkena di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian itu berkembang maju, dan berbagai perolehan hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran. (Adrian Sutedi, Sinar Grafika, 2007, Hukum Perbankan, 17). Secara umum dapat dimengerti bahwa pencucian uang ini dilakukan sebagai upaya untuk melegalkan penghasilan ilegal

(legitimizing illegitimate income). Dengan kegiatan pencucian uang ini maka uang hasil kegiatan yang illegal diubah menjadi aset keuangan seolah-olah uang tersebut merupakan hasil kegiatan yang sah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku

Dengan semakin berkembangnya teknologi yang berdampak pada berkembangnya modus dan teknik kejahatan yang semakin beragam maka lembaga perbankan merupakan lembaga yang erat kaitannya dengan adanya kegiatan money laundering tersebut, hal ini disebabkan lembaga perbankan adalah badan yang menawarkan jasa instrument dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan dan menyamarkan dimana dana itu berasal. Karena perkembangan teknologi yang amat pesat memungkinkan lembaga perbankan untuk melakukan aktifitas perpindahan jumlah rekening ke negara satu dengan negara lainnya dalam hitungan detik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa amatlah mudah dana hasil kegiatan pencucian uang akan sangat mungkin berpindah dengan cepat bahkan ke suatu negara yang tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut.

Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga yang sangat kondusif dan berpotensi untuk terlibat dalam tindak pidana pencucian uang tersebut. Hal ini disebabkan karena lembaga perbankan merupakan lembaga yang membayai tugas antara lain sebagai lembaga yang mengatur dan melaksanakan sistem pembayaran yang ada dalam transaksi ekonomi yang ada.

Secara semantik Laundering atau mencuci berarti membersihkan sesuatu yang semula kotor menjadi barang sesuatu yang dapat diterima oleh manusia oleh manusia karena menyehatkan dan telah dipisahkan dari unsur-unsur yang membuat barang tersebut tidak murni atau tidak bersih lagi (Gunarto Suhardi, 2004, tanpa halaman). Dalam hal uang tunai maka jika uang tersebut bukan uang palsu atau lusuh maka uang tersebut dianggap sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan demikian yang dimaksud uang kotor adalah bukan uangnya akan tetapi pada kepemilikan atas uang tersebut atau proses kepemilikan uang tersebutlah yang perlu diketahui oleh bank. Dalam hal ini bila proses kepemilikan dari uang tersebut berasal dari suatu kegiatan yang dianggap tidak sah maka uang tersebut disebut uang yang kotor. Tindakan yang mencoba untuk mengaburkan atau menyembunyikan proses kepemilikan yang tidak sah tadi menjadi sesuatu yang sah inilah yang dinamakan tindak pidana pencucian uang. Bank dalam hal ini merupakan lembaga yang otomatis tersangkut dengan kegiatan pencucian uang, hal ini disebabkan karena salah satu fungsi bank adalah melakukan fungsi pembayaran.

Kejahatan tersebut dilakukan dengan melakukan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan, menyembunyikan uang tersebut dengan berbagai cara. Bank merupakan pihak yang sangat kondusif dan berpotensi sekali untuk

terlibat dalam kegiatan pidana pencucian uang tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa tindak pidana pencucian uang menurut pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 15 tahun 2002 Tindak pidana pencucian uang mengatakan bahwa :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja
 - a. menempatkan Harta kekayaan yang¹ dikeyahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia jasa Keuangan , baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.
 - b. Mentransfer harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan yang lain , baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
 - c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana , baik perbuatan itu atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain.
 - d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana , baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain
 - e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain .
 - f. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana
 - g. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya dengan maksud Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana , dipidana karena tindak pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)
- 2) Setiap orang yang melakukan percobaan , pembantuan , atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah orang perseorangan atau korporasi . hal ini berarti bahwa setiap subyek hukum merupakan pihak yang dianggap dapat melakukantindak pidana pencucian uang ini. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil tindak pidana menurut pasal 2 UU Tentang tindak

Pidana Pencucian Uang adalah ,harta kekayaan a yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi
- b. penyuapan
- c. penyelundupan barang
- d. penyelundupan tenaga kerja
- e. penyelundupan imigran
- f. di bidang perbankan
- g. dibidang pasar modal
- h. dibidang asuransi
- i. narkotika
- j. psikotropika
- k. perdagangan manusia
- l. perdagangan senjata gelap
- m. penculikan
- n. teroridupsme
- o. pencurian
- p. penggelapan
- q. penipuan
- r. pemalsuan uang perjudian
- s. prostitusi
- t. dibidang perpajakan
- u. dibidang kehutanan
- v. dibidang lingkungan hidup
- w. dibidang kelautan;atau
- x. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan diwilayah Negara republik Indonesia atau diluar wilayah republik Indonesia .

Selanjutnya Tahap proses pencucian uang ng terdiri atas :

- a. Penempatan (placement) yakni upaya menempatkan uan tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan (financial system) atau menempatkan uang uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali kedalam system keuangan , terutama system perbankan .
- b. Transfer (layering) yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke penyedia jasa keuangan yang lain.Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.
- c. Menggunakan harta kekayaan (integration) yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidanayang telah berhasil masuk kedalam system keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-oleh menjadi

menjadi harta kekayaan halal atau untuk membiayai kegiatan kejahatan.

Dari uraian diatas dapat dikaji bahwa lembaga perbankan merupakan suatu lembaga yang sangat kondusif dan berpotensi untuk terlibat dalam tindak pidana pencucian uang tersebut. Hal tersebut tampak pada tahap proses pencucian uang diatas yaitu placement, lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat kondusif untuk dipergunakan sebagai tempat menyimpan hasil tindak pidana pencucian uang tersebut. Tahap layering juga menempatkan bank pada pihak yang dapat terkait dengan adanya tindak pidana pencucian uang tersebut. Hal ini disebabkan karena lembaga perbankan merupakan lembaga yang mempunyai tugas antara lain sebagai lembaga yang mengatur dan melaksanakan sistem pembayaran yang ada dalam transaksi ekonomi yang ada. Bila dilihat dari kriteria perbuatan tindak pidana pencucian uang tersebut maka dapat dilihat bahwa lembaga perbankan merupakan pihak yang mempunyai kemungkinan besar terlibat dalam tindak pidana tersebut karena lembaga perbankan lah yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan sistem pembayaran tersebut.

D. Prinsip mengenal Nasabah Bagi lembaga perbankan Dalam kaitannya Dengan Tindak pidana Perbankan .

Seperti telah diuraikan dimuka bahwa lembaga perbankan sangat berpotensi sebagai lembaga yang berperan dalam menghambat beredarnya hasil tindak pidana pencucian uang maka lembaga perbankan dalam kewajibannya melaporkan suatu transaksi yang mencurigakan seperti pada

Pasal 13 ayat 1 UU Tindak pidana Pencucian uang, mengatakan bahwa

(1) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPTAK sebagaimana dimaksud dalam BAB V untuk hal-hal sebagai berikut.

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan
- b. Transaksi Keuangan yang dilakukan Secara Tunai dalam Jumlah Kumulatif sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uangasing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja.

Pasal ini memberi kewajiban kepada penyedia Jasa Keuangan, khususnya lembaga perbankan untuk melaporkan hal-hal tersebut ke PPTAK. Bagi lembaga perbankan maka tools untuk mengetahui apakah transaksi itu mencurigakan apa tidak adalah dengan prinsip mengenal nasabah (know Your Customer)

Konsekuensi positif dari penerapan prinsip mengenal nasabah ini dapat dilihat bahwa lembaga perbankan merupakan

lembaga yang kondusif untuk dilakukan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah Negara republik Indonesia maupun yang melintasi batas wilayah Negara .

Keterlibatan bank dalam tindak pidana perbankan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan oleh karena itu terdapat mekanisme hukum supaya bank sebagai lembaga keuangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang tersebut yaitu dengan diterapkannya Prinsip Mengenal Nasabah. Dengan penerapan ketentuan prinsip mengenal nasabah ini maka lembaga perbankan diberi kewenangan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).

Berkaitan dengan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah bagi lembaga perbankan yang memberikan kewenangan bagi lembaga perbankan untuk mengetahui identitas calon nasabah baik mengenai maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk mengetahui profil calon nasabah dan untuk mengetahui identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana . Lembaga perbankan juga diberikan kewenangan untuk memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan kegiatan yang mencurigakan. Dengan kewenangan tersebut maka lembaga perbankan dapat mengurangi risiko untuk terlibat tindak pidana pencucian uang seperti dituangkan dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang tindak pidana Pencucian Uang . Hal tersebut membawa konsekuensi yang positif bagi bank karena bila prinsip mengenal nasabah ini dapat diterapkan dengan baik maka bank dapat terhindar dari perbuatan pembantuan dalam tindak pidana pencucian uang dan dapat menghindarkan diri dari perbuatan tersebut yang dapat sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

E. Implikasi Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Perdagangan Bebas

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu upaya untuk mengubah suatu harta kekayaan yang merupakan suatu hasil suatu tindak pidana dari haram menjadi halal , hal itu sebagian besar dilakukan melalui lembaga keuangan .

Tindak Pidana pencucian uang ini dapat berimplikasi dari beberapa aspek adalah

1. Ekonomi

- a. Instabilitas sistem keuangan , negara yang tidak memberikan perhatian terhadap Pemberantasan tindak Pidana pencucian uang akan dimasukkan dalam daftar Non-Cooperative Countries and territories(NCCTs), negara yang dimasukkan dalam daftar NCCTs ini dapat dikenakan Counter Measures (Sejak Juni Tahun 2001,Indonesia telah dimasukkan ke dalam NCCTs List ini, hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan yang menetapkan money laundring sebagai tindak pidana, Tidak adanya KYC bagi lembaga non Bank, Minimnya kapasitas sumber daya dalam penanganan tindak Pidana pencucian uang, kurangnya kerjasama internasional dalam tindak Pidana Pencucian Uang (UGM,29 Juli 2007). Counter measures dapat mengakibatkan meningkatnya biaya transaksi keuangan dalam melakukan transaksi perdagangan internasional, atau penolakan LC yang diterbitkan oleh negara yang termasuk NCCTs ini oleh negara partner dagangnya, hal ini pernah dialami oleh pelaku-pelaku bisnis dari Indonesia.Dampak lain yang mungkin timbul adalah ketidakpercayaan masyarakat internasional terhadap pelaku ekonomi, lembaga keuangan ataupun , alat pembayaran dari Indonesia yang berupa penolakan atau pemutusan hubungan koresponden lembaga keuangan . hal ini tentulah akan mengganggu sistem keuangan secara makro di Indonesia.

2. Hukum dan Sosial

Bila Tindak pidana pencucian uang sebagai upaya untuk melegalkan uang hasil tindak pidana menjadi uang yang halal untuk digunakan tidak diatur lebih lanjut maka hal ini akan menyebabkan semakin maraknya kejahatan dan merajalelanya penggunaan uang hasil kejahatan tersebut ke bentuk-bentuk yang tidak tersentuh oleh hukum

3. Politis

Bila kesempatan untuk mempergunakan uang hasil tindak pidana tersebut diberikan kelonggaran untuk berkembang , maka arus beredarnya uang sebagai hasil tindak pidana pencucian uang tersebut akan semakin mudah datang dan pergi dari negara tersebut, hal tersebut akan berakibat bahwa secara politis suatu negara akan reputasi pasar , mempunyai potensi untuk dituntut , dan reputasi Indonesia sebagai suatu negara yang aman dapat dipercaya akan hilang, hal ini tentu dapat akan sangat merugikan secara politis bagi Indonesia karena akan memperburuk citra Indonesia dalam pergaulan dunia .

Melihat dampak –yang diakibatkan adanya tindak Pidana Pencucian Uang disuatu negara secara global maka mau tidak mau Negara Indonesia harus melakukan suatu tindakan untuk menghambat arus perputaran Hasil tindak pidana pencucian uang tersebut.

Dari uraian diatas dapat dikaji bahwa adanya tindak pidana pencucian uang disuatu negara khususnya negara Indonesia dan tidak adanya hambatan arus peredaran hasil tindak pidana pencucian uang khususnya yang melalui lembaga perbankan dapat menimbulkan distorsi bagi iklim perdagangan bebas, hal ini menjadikan suatu keharusan bagi Indonesia untuk memberik memberikan rambu-rambu dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak pidana pencucian uang dan uanh hasil tindak pidana tersebut dapat diambil untuk Negara, hal ini dapat dilihat dengan keluarnya indoneia dar NCCTs List pad tanggal 22 february 2005. Walaupun pada kenyataannya Terdapat beberapa hambatan antara lain bahwa sifat dari tindak pidana pencucian uang sangatlah cepat , transaksi dalam perdagangan internasional dapat dilakukan dalam hitungan detik, dilain pihak bila ada suatu transaksi mencurigakan yang dianggap dan berindikasi pada tindak pidana pencucian uang , dan PPATK melaporkan hasil analisis tersebut ke kepolisisn dan dan kejaksanaan maka prosedurnya memerlukan waktu yang lama. Hal tersebut akan sangat menghambat efektifitas dari UU Tindak pidana pencucian Uang. Hambatan-hambatan tersebut tidak akan menghentikan upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk paling tidak menghambat beredarnya hasil tindak pidana pencucian uang. Dari aspek perdagangan bebas hal tersebut upaya-upaya tersebut sanagatlah penting untuk memberikan kepercayaan Negara lain dalam melakukan transaksi bisnis dengan Negara Indonesia.

4. Tinjauan tentang Tujuan Hukum dalam kaitannya dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang

Ada banyak pendapat tentang definisi tentang hukum , walaupun demikian secara umum hukum dapat dipandang sebagai salah satu norma diantara norma-norma yang lain didalam masyarakat yaitu norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan . Persamaan dari norma-norma yang ada didalam masyarakat tersebut adalah bahwa norma tersebut menjadi pedoman bagi masyarakat bagaimana seseorang seharusnya berperilaku. Perbedaanannantara norma-norma tersebut yaitu adanya sanksi , khussunya norma hukum yang hadir didalam masyarakat yang mempunyai ciri adanya sanksi yang bersifat kongkrit didalam masyarakat tersebut. Ini merupakan daya pemaksa untuk menjamin pelaksanaan hukum tersebut.

Hukum dibuat untuk mencapai tujuannya. Paham Utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum (Darji Darmodiharjo, 2002,117).Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan . aliran ini sejalan dengan positivisme hukum yang sampai pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat,disamping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang terbanyak .

Ini berarti hukum merupakan pencerminan perintah penguasa dan bukan pencerminan dari rasio semata. Tujuan hukum tersebut bila dikaitkan dengan keberadaan Undang-undang tindak pidana Pencucian Uang dapat dikaji bahwa masyarakat memang tidak secara langsung mendapatkan manfaat dari pelaksanaannya UU ini, hal ini disebabkan masyarakat tidak secara langsung menjadi korban dari adanya Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga secara langsung UU tersebut dirasakan tidak memberi manfaat kepada masyarakat, tetapi bila dianalisis bahwa bila pelaksanaan uu tersebut dapat dengan baik dilakukan, maka kredibilitas Indonesia khususnya lembaga keuangan yang baik dimata negara lain, akan sangat menguntungkan bagi perbaikan ekonomi di negara kita. Secara tidak langsung rakyat akan menikmati hasilnya.

5. Kesimpulan

- a) Peran Negara masih sangat relevan dengan adanya globalisasi, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana pencucian uang. Tentu saja peran Negara tersebut harus dilihat pada hal-hal yang selektif.
- b) UU Tindak pidana Pencucian, akan memberikan kemanfaatan secara tidak langsung kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan), Sinar Grafika, 2007
- Budi Winarno, Globalisasi Wujud Imperialisme Baru, Tajidu Press, Yogyakarta, 2005
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- I. Wibowo, Neo liberalisme dan Kampanye Anti Negara dalam I Wibowo dan Francis Wahono, Neoliberalisme, Cindelaras, Yogyakarta,
- Munir Fuady, Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum WTO), Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004
- Yenti Ganarsih, Kriminalisasi Pencucian Uang, Penerbit UI, Jakarta, 2003